

ISLAM DAN NEGARA: STUDI PEMIKIRAN AL-MAWARDI DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS INDONESIA

Fathor Rohman^{1,*}, M Hilali Basya², Sopa³
^{1,2,3}Magister Studi Islam, FAI, Universitas Muhammadiyah Jakarta

* rfatur1993@gmail.com

ABSTRAK

Meskipun studi tentang pemikiran politik Islam di Indonesia sudah banyak dilakukan, masih sangat sedikit penelitian tentang kompatibilitas pemikiran politik Islam, yang berasal dari periode klasik dan pertengahan yang selama ini mempengaruhi politik Islam di Indonesia, dengan konteks Indonesia. Pemikiran Imam Al-Mawardi (hidup di abad ke-12) patut disebut dalam hal ini. Pemikiran politik Islam Al-Mawardi menjadi rujukan penganut Sunni dan madzhab Syafii yang di Indonesia merupakan mayoritas. Artikel ini mengkaji pemikiran Imam Al-Mawardi terkait relasi agama (Islam) dan negara dan kompatibilitasnya di Indonesia. Studi ini menggunakan kajian pustaka yang sumber data primernya adalah kitab (buku) yang ditulis oleh al-Mawardi yaitu *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*. Dengan menggunakan *qualitative content analysis* (analisis isi kualitatif) data dikumpulkan dan dianalisa. Artikel ini menyimpulkan bahwa pemikiran politik Al-Mawardi telah diadopsi oleh mayoritas kaum Sunni di Indonesia dengan adaptasi atau penyesuaian dengan konteks Indonesia, sehingga kompatibel dengan konsep negara modern Indonesia.

Kata kunci: Pemikiran Politik Islam, al-Mawardi, Relasi Islam dan Negara, Indonesia

ABSTRACT

*Even though study concerning Islam and politics has been conducted by many researchers, few of them investigating about compatibility of Islamic political thoughts, which originated from the classical and medieval periods that have been influencing Islamic political movements and thoughts in Indonesia, with Indonesian context. Thoughts of Imam al-Mawardi (lived in the 12th Century) is one of them that should be mentioned in this regard. Islamic political thoughts of al-Mawardi become the main reference for Sunni Muslims who are the majority in Indonesia. This article investigates about the political thoughts of al-Mawardi concerning the relationship between Islam and state as well as their compatibility with Indonesian context. This study uses the library research in which its primary resource is a book written by al-Mawardi entitled *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*. By utilizing qualitative content analysis, data were collected and analyzed. This article argues that the Islamic political thought of al-Mawardi has been adopted by majority of Indonesian Sunni Muslims with some adjustments with Indonesian context, so that his thoughts become compatible with the concept of modern nation-state of Indonesia.*

Keywords: Islamic political thought, al-Mawardi, Islam and state, Indonesia

1. PENDAHULUAN

Hubungan agama dan negara menjadi topik penting dalam wacana sosial politik masyarakat Indonesia sejak persiapan kemerdekaan Indonesia tahun 1940-an (Azra, 2012). Dalam sejarah Indonesia modern awal, umat Islam pada umumnya terbagi dalam dua sayap yang berbeda. Kelompok pertama adalah mereka yang tidak menginginkan negara berdasarkan agama tertentu, khususnya Islam (Assyaukanie, 2009; Basya, 2011). Golongan ini biasa disebut sebagai nasionalis sekuler, atau disebut juga sekularis. Soekarno (Presiden pertama Republik Indonesia, memerintah tahun 1945-1966) dan Moehammad Hatta (Wakil Presiden pertama) adalah representasi dari kaum nasionalis sekuler. Kelompok kedua adalah mereka yang bersikeras menjadikan Islam sebagai dasar negara, khususnya dalam hal hukum negara, politik, dan sistem ekonomi (Assyaukanie, 2009; Basya, 2016). Kelompok ini umumnya dikenal sebagai Islamis (Hamid, 2011). Perdebatan dan kontestasi antara dua kelompok yang berseberangan ini tidak hanya terjadi pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia, tetapi juga berlanjut hingga beberapa dekade berikutnya (Effendy, 2009).

Perdebatan tentang sejauh mana Islam dapat memainkan perannya dalam negara tidak dapat dipisahkan dari karakter Islam yang tumbuh di dalam sebuah negara (Lewis, 2002). Muhammad (570-632), Nabi yang menyampaikan risalah Islam, bukan hanya seorang utusan Tuhan, tetapi juga seorang kepala negara. Oleh karena itu, ajaran Islam berkembang dalam konteks di mana ia terlibat dalam mengatur kehidupan sosial dan politik. Tidakkah mengherankan jika banyak ulama (cendekiawan agama) dan cendekiawan Muslim percaya bahwa ajaran Islam mencakup aspek politik dan duniawi lainnya (Lewis, 2002). Namun, mereka memiliki berbagai pandangan dalam menjelaskan bagaimana detail hubungan antara Islam dan negara (Ayoob, 2008).

Salah satu ulama klasik yang menulis tentang topik ini adalah al-Mawardi (hidup di abad 10-11) yang merupakan ulama Syafi'ian (Black, 2011). Pemikiran Al-

Mawardi menjadi acuan mayoritas umat Islam yang menganut madzhab Syafi'i (madzhab) yang sebagian besar diikuti oleh umat Islam Indonesia.

Mengingat gagasan al-Mawardi tersebar luas di kalangan umat Islam Indonesia, maka penting untuk mempelajari pemikirannya dan kesesuaiannya dalam konteks Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan penelitian kepustakaan yang sumber utamanya adalah buku karya al-Mawardi berjudul *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* (Tata Cara Pemerintahan). Dengan menggunakan analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*), data dikumpulkan dan dianalisis. Teks (kalimat atau paragraf) yang relevan dari kedua buku tersebut dikaji dan dianalisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Nama lengkap Imam al-Mawardi adalah Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Mawardi (974-1058). Ia lahir di Basrah, Irak. Al-Mawardi dibesarkan dalam keluarga yang memiliki minat besar dalam mempelajari mata pelajaran agama. Ia dikenal sebagai tokoh terkemuka di mazhab Syafi'i dan berpangkat pejabat tinggi yang memiliki pengaruh besar di dinasti Abbasiyah (Hadad, 1996).

Salah satu bukunya yang berpengaruh adalah "Al-Ahkam al-Sulthaniyah". Buku tersebut memaparkan tentang teori politik negara dalam kerangka Islam dan ketatanegaraan. Pemikiran al-Mawardi tentang konsep negara dapat dilihat dari pemaparannya tentang khilafah atau imamah dalam bukunya tersebut (Al-Mawardi, 2006).

Meskipun buku ini tidak secara gamblang menjelaskan bagaimana dan mengapa masyarakat membentuk negara, al-Mawardi (2006) secara implisit menegaskan bahwa negara bukanlah produk dari kontrak sosial "sekuler". Gagasan kontrak sosial berarti bahwa interaksi sosial di antara orang-orang dan kebutuhan untuk membangun keamanan dalam interaksi mereka mengarahkan orang-orang untuk secara politis

mendirikan negara. Dalam konsepsi ini, negara sebenarnya adalah organisasi sekuler yang diciptakan untuk kepentingan bersama orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang suku dan etnis. Berbeda dengan konsep negara sekular ini, al-Mawardi secara tidak langsung menegaskan bahwa negara diberikan oleh Tuhan (Allah) dengan cara memilih suku atau keluarga tertentu dan memberikan otoritas politik kepada mereka. Dalam bukunya al-Mawardi mengatakan:

Ada tujuh syarat mengenai mereka yang cocok untuk Imamah: ...7) Dari keluarga Quraisy, karena teks (sebuah hadits kenabian) tentang masalah ini dan berdasarkan konsensus. (al-Mawardi, 2006: 12)

Melalui penjelasan ini al-Mawardi ingin menjustifikasi legalitas keluarga Abbasiyah sebagai bagian dari suku Quraisy. Konsekuensinya, negara adalah milik penguasanya, sedangkan rakyat menjadi subjek yang harus dilindungi oleh penguasa. Konsep negara ini bersifat patrimonial dimana khalifah dan keluarganya menjadi pemilik negara.

Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran al-Mawardi tentang negara tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-politik di mana al-Mawardi hidup di mana khalifah Abbasiyah mengklaim diri sebagai orang yang dipilih untuk menjaga urusan sosial, politik, serta agama umat Islam (Crone dan Hinds, 2003). Alih-alih menawarkan konsep negara ideal yang kritis terhadap institusi yang ada, al-Mawardi berusaha membenarkan realitas politik yang dilakukan oleh para Khalifah Abbasiyah. Hal ini sejalan dengan argumen Black (2011) bahwa sebagian besar pemikir politik Muslim di era klasik cenderung membuat pembenaran bagi penguasanya (Black, 2011). Hal ini dilakukan oleh para pemikir tersebut karena konteks politik yang mengharuskan mereka untuk terlibat dalam membantu penguasa untuk menciptakan situasi politik yang kuat dan stabil.

Lebih lanjut, negara yang dikonseptualisasikan oleh al-Mawardi menuntut umat Islam untuk bersatu dalam satu negara. Semua umat Islam harus diintegrasikan dalam satu institusi politik

dan di bawah satu Khalifah, seperti yang dikemukakan oleh al-Mawardi (2006: 29) "...tidak boleh ada dua imam sekaligus." Gagasan ini menekankan tentang ruang lingkup universal kekhalfahan. Seorang khalifah harusnya hanya satu, dan akibatnya umat Islam harus menolak khalifah lain di luar khalifah yang sah. Dengan argumen ini al-Mawardi membujuk umat Islam untuk mendiskreditkan Kekhalifahan Fatimiyah di Kairo yang mengklaim sebagai Kekhalifahan Islam serta merongrong atau menundukkan dinasti Islam kecil lainnya di tanah provinsi di bawah pemerintahan Abbasiyah seperti Buyid atau Buwaih. Dinasti-dinasti itu harus setia dan menjadi bagian dari kekhalfahan Abbasiyah.

Konsep negara yang dibayangkan oleh al-Mawardi adalah kekuatan politik imperium yang mempertahankan wilayahnya yang luas dibantu oleh penguasa lokal (gubernur). Patut dicatat bahwa Kekhalifahan Abbasiyah pada masa al-Mawardi hidup mengalami kemunduran, yang ditandai salah satunya dengan disintegrasi politik. Meskipun disintegrasi tidak dapat diartikan sebagai pemisahan politik penguasa lokal dari pemerintahan pusat kekhalfahan Abbasiyah, namun disintegrasi berarti merosotnya soliditas politik antara pemerintah pusat di Bagdad dan penguasa lokal yang diwakili oleh dinasti-dinasti kecil di beberapa daerah. Konsep negara yang demikian memang telah ada dalam masyarakat Muslim sejak Khalifah Terpimpin (al-Khulafa ar-Rasyidun) dan Khilafah Bani Umayyah. Luasnya wilayah yang diduduki oleh penguasa politik Islam menuntut pemerintah pusat yang masing-masing berada di Madinah dan Damaskus saat itu mendelegasikan kekuasaan atau kewenangannya kepada penguasa lokal (gubernur) di setiap distrik. Namun pada masa al-Mawardi, kekuatan politik penguasa lokal semakin kuat dan cenderung independen dari pemerintah pusat. Hal ini tampaknya merupakan implikasi dari luasnya wilayah yang harus dikelola oleh pemerintah sementara saat itu belum ada sarana yang efektif seperti teknologi komunikasi yang dapat

dimanfaatkan untuk mengonsolidasikan kekuasaannya.

Perlu dicatat bahwa al-Mawardi membedakan negara dari agama. Menurut al-Mawardi (2006), negara adalah institusi politik sedangkan agama terdiri dari doktrin-doktrin tentang iman, ritual, moral, dan nilai-nilai. Pemikiran ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan realitas politik yang dilakukan oleh Kekhalifahan Bani Umayyah dan Abbasiyah. Para khalifah telah membedakan antara wilayah negara yang dipegang oleh khalifah atau penguasa dan wilayah agama yang dipegang oleh ulama. Realitas politik ini sebenarnya bukanlah konsep yang ideal bagi para khalifah, karena perbedaan itu juga merupakan indikasi kontestasi antara khalifah dan ulama. Terjadi ketegangan antara keinginan para ulama terkait dengan doktrin Islam yang mereka yakini dan kepentingan politik para khalifah. Ketegangan ini terkadang berubah menjadi konflik tajam seperti yang terjadi pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah.

Bagi al-Mawardi (2006: 15), negara adalah lembaga yang berfungsi sebagai otoritas politik yang mengatur kehidupan sosial atau urusan duniawi dan dimensi keagamaan. Cakupan kehidupan sosial yang dimaksud al-Mawardi adalah ekonomi, politik, hukum, pendidikan, dan aspek lain dari kehidupan sehari-hari manusia. Sedangkan dimensi religius yang dimaksud al-Mawardi adalah ekspresi religiusitas seperti keyakinan (pandangan teologis Islam tertentu), ritual, dan moralitas. Dengan kata lain, negara harus mendukung ekspresi umat Islam terkait dengan keyakinan agama, ritual, dan norma-normanya. Pemikiran politik al-Mawardi ini berimplikasi bahwa kedua domain ini meskipun berkorelasi, namun berbeda. Urusan duniawi bersifat relatif dan merupakan interpretasi manusia, sedangkan aspek agama lebih sakral. Meskipun pemikiran ini berbeda dengan sekularisasi yang disuarakan oleh para pemikir modernis dan sekularis di zaman modern, pemikiran al-Mawardi dapat digunakan sebagai pintu masuk untuk menjustifikasi karakter “sekuler” dari konsep negara-bangsa modern.

Patut disebutkan bahwa al-Mawardi (2006: 15) menyoroti bahwa fungsi negara tidak hanya untuk memelihara, tetapi juga “sebagai sarana untuk melindungi agama (Islam)”. Kalimat ini menimbulkan pertanyaan apakah negara harus memberikan keistimewaan kepada agama tertentu, yaitu Islam, atau bahkan teologi atau mazhab Islam tertentu. Ada pengalaman bahwa para penguasa Abbasiyah menyukai pandangan teologis tertentu. Khalifah Al-Makmun adalah salah satu contoh penguasa yang mendukung teologi Mu'tazilah dan melemahkan bahkan menganiaya non-Mu'tazilah dalam menghadapi perdebatan tentang apakah Al-Qur'an itu diciptakan atau tidak (Martin, Woodward, dan Atmaja, 2003). Oleh karena itu kemungkinan besar al-Mawardi juga terpengaruh oleh kecenderungan atau kebijakan politik tersebut sehingga para khalifah harus memberikan keistimewaan kepada agama tertentu, yaitu Islam, dan kelompok teologi tertentu yaitu Sunni vis a vis Syiah.

Pemikiran Al-Mawardi menyebar di Indonesia melalui mazhab Syafi'i (madzhab), dan secara umum melalui Muslim Sunni, baik tradisional maupun reformis (Asari, 2019). Karena afiliasi al-Mawardi dengan madzhab Syafi'i, semua Syafi'i akan mengadopsi pemikiran al-Mawardi dalam menghadapi wacana hubungan negara-agama. Selain itu, sebagian besar Muslim Sunni juga akan menganut pemikiran politik al-Mawardi. Pemikirannya sangat berpengaruh di kalangan ulama Indonesia baik tradisional maupun reformis.

Karena konteks klasik yang melahirkan pemikiran politik al-Mawardi, dapat dikatakan bahwa pemikiran al-Mawardi tentang hubungan antara agama dan negara tidak cocok dengan negara-bangsa modern Indonesia. Sifat patrimonial dari kekhalifahan yang berarti bahwa negara adalah milik penguasa dan keluarga mereka tidak memiliki tempat untuk negara modern saat ini. Begitu pula dengan pemberian keistimewaan bagi agama tertentu (Islam). Seperti negara modern lainnya, negara Indonesia cenderung netral dengan semua agama yang ada di negara ini. Akibatnya,

mengadopsi sepenuhnya pemikiran al-Mawardi tanpa memahami konteks di mana pemikirannya dihasilkan akan membuatnya tidak sesuai dan berbenturan dengan nilai dan prinsip negara modern Indonesia.

Namun, karena upaya yang dilakukan oleh para ulama dari madzhab Syafi'i dan ulama Sunni lainnya di Indonesia yang berusaha untuk menafsirkan kembali dan mendamaikan beberapa aspek pemikiran al-Mawardi, pemikiran al-Mawardi menjadi sesuai dengan karakter negara modern yang membutuhkan netralitas dari agama, pembentukan nasionalisme, rasionalitas publik, partisipasi publik, persamaan di depan hukum, dll. Negosiasi seperti itu biasa dilakukan oleh tokoh-tokoh atau lembaga pendidikan tradisional maupun modern di Indonesia dalam menghadapi modernitas (Nasution et.al., 2019; Rahimah, 2019; Djalal, 2020). Oleh karena itu, reinterpretasi dan negosiasi menjadi kunci untuk menjadikan pemikiran al-Mawardi yang konservatif dan sektarian menjadi modern dan pluralis.

4. KESIMPULAN

Relasi antara Islam dan negara telah menjadi topik hangat, karena di satu sisi banyak umat Islam percaya bahwa Islam tidak hanya tentang iman dan ritual, tetapi juga mencakup kehidupan sosial dan politik. Di sisi lain, masyarakat kontemporer menuntut kehidupan sosial dan politik diatur oleh rasionalisme atau ilmu pengetahuan modern. Perlu dicatat bahwa dominasi rasionalisme atau ilmu-ilmu modern dapat berdampak pada sekularisasi kehidupan sosial dan politik, sedangkan integrasi agama (Islam) dan negara akan membuat negara bekerja untuk misi dan tujuan Islam yang bertentangan dengan karakter negara modern. Dua posisi ini bisa membuat umat Islam bingung. Oleh karena itu bagaimana umat Islam menghadapi dua posisi ini menjadi perhatian artikel ini.

Artikel ini memaparkan tentang pemikiran seorang pemikir Muslim, al-Mawardi, yang hidup pada periode klasik. Fokus artikel ini adalah mengkaji pemikiran al-Mawardi tentang relasi

antara agama (Islam) dan negara, serta sejauh mana kesesuaiannya dalam konteks Indonesia.

Pemikiran Al-Mawardi tentang relasi antara Islam dan negara diproduksi dalam konteks tertentu di mana Islam memiliki posisi istimewa dalam negara, agama setiap orang (warga negara) menjadi acuan negara dalam memperlakukan mereka, dan dan imperium dianggap sebagai lembaga politik yang paling kuat. Oleh karena itu mengadopsi pemikiran al-Mawardi tanpa mengkontekstualisasikannya akan menjadikan pemikiran tersebut tidak sesuai dengan karakter negara Indonesia modern. Hal ini telah diakui oleh umat Islam Indonesia. Ketegangan dan konflik yang terjadi di kalangan umat Islam Indonesia sejak masa persiapan kemerdekaan Indonesia hingga beberapa dekade kemudian membuat mereka mengevaluasi dan memikirkan kembali pemikiran politik Islam yang mereka pelajari dari para ulama klasik termasuk dari al-Mawardi. Meskipun mengadopsi pemikiran al-Mawardi, mereka telah menafsirkan ulang dan mengontekstualisasikannya agar sesuai dengan konteks Indonesia yang plural dan modern.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima Kasih kepada Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang telah memberikan dukungannya untuk menerbitkan tesis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi. (2006). *Al-Ahkam Al-Sultaniyya*. Cairo: Dar al-Hadits.
- Asari, Hasan. (2019). "Ulama Training and Modernizing Al-Washliyah Madrasah", *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, 3(2), pp. 149-175.
- Assyaukanie, Luthfi. (2009). *Islam and the Secular State in Indonesia*. Singapore: ISEAS.
- Ayoob, Mohammed. (2008). *The Many Faces of Political Islam: Religion and Politics in the Muslim World*. The United State of America: The Michigan University Press.

- Azra, Azyumardi. (2012). "Revitalisasi Islam Politik dan Islam Kultural di Indonesia." *Indo-Islamika*, 1(2), pp. 233-244.
- Baswedan, Anies Rasyid. (2004). "Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory." *Asian Survey*, 44(5), pp. 669-690.
- Basya, Muhammad Hilali. (2016). *Islam, Secularity and the State in Post-New Order Indonesia: Tensions between Neo-Modernist and Revivalist Leaderships in the Muhammadiyah, 1998-2005*. Unpublished doctoral thesis, Leeds: University of Leeds-UK.
- Basya, Muhammad Hilali. (2011). *Muhammadiyah Scholars and Democratic Transition: Response on Radical Islam Movements in Post-New Order Indonesia*. Germany: VDM.
- Bellah, Robert N. (1976). "Islamic Traditions and Problems of Modernization", in Robert N. Bellah (ed), *Beyond Belief*. New York: Harper & Row.
- Black, Antoni. (2011). *The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the Present*. 2nd edition, Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Bryman, Alan. (2009). *Social Research Methods*. Third edition. Oxford: Oxford University Press.
- Crone, Patricia., Hinds, Martin. (2003). *God's Caliph: Religious Authority in the First Centuries of Islam*. London: Cambridge University Press.
- Djalal, Abdul. (2020). "Islam Moderat dan Islam Radikal dalam Perspektif Generasi Milenial Kota Surabaya." *Hayula*, 4(2), pp. 203-228.
- Effendy, Bahtiar. (2009). *Islam and the State in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).
- Haddad, Wadi Zatoan. (1996). "Ahl al-dhimma in an Islamic State: the teaching of Abu al-Hasan al-Mawardi's Al-Ahkām al-Sultaniyya", journal of *Islam and Christian-Muslim Relations*, 7(2), pp. 169-180.
- Hamid, Shadi. (2011). "The rise of the Islamists." *Foreign Affairs*, 90(3).
- Karim, A., Purnomo, H., Fikriyah, F., & Kardiyati, E. N. (2020). A charismatic relationship: How a Kyai's charismatic leadership and society's compliance are constructed? *Journal of Indonesian Economy and Business*, 35(2), pp. 129-143. <https://doi.org/https://doi.org/10.2146/jieb.54705>.
- Lewis, Bernard. (1988). *The Political Language of Islam*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Lewis, Bernard. (2002). *What Went Wrong?* New York: Oxford University Press.
- Machmudi, Yon. (2013). *Islamizing Indonesia: the Rise of Jamaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party*. Canberra: The Australian National University.
- Maksum, Ali. (2017). "Discourses on Islam and Democracy in Indonesia: A Study on the Intellectual Debate between Liberal Islam Network (JIL) and Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)." *Journal of Indonesian Islam*, 11(2), pp. 405-422.
- Martin, Richard., Woodward, Mark., Atmaja, Dwi S. (2003). *Defenders of Reason in Islam: Mu'tazilism from Medieval School to Modern Symbol*. Oxford: One World Publication.
- Nasution, Ismail Fahmi Arrauf., Miswari., Sabaruddin. (2019). "Preserving Identity through Modernity: Dayah al-Aziziyah and Its Negotiations with Modernity in Aceh." *Hayula*, 3(2), pp. 211-232.
- Rahimah, Rt Bai. (2019) "Persepsi Santri tentang Moderasi Islam dan Wawasan Kebangsaan." *Hayula*, 3(2), pp. 139-156.